

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam hal pelaksanaan pembangunan, keuangan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan cukup penting dalam melaksanakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu masalah keuangan ini membutuhkan pengelolaan yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terhambat. Dana-dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Masalah keuangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini telah mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan dan perundang-undangan ini antara lain mencakup sistem perencanaan, pemanfaatan dan juga tanggung-jawab. Jika aturan dan perundang-undangan ini diabaikan maka dapat dipastikan sasaran pembangunan yang telah ditentukan tidak akan tercapai.

Suatu unsur penting yang dipakai dalam menjaga kelancaran pengelolaan keuangan ini adalah administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini dimiliki oleh semua unsur atau badan yang terkait dalam melaksanakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Baik instansi negeri maupun swasta, pada instansi negeri, administrasi keuangan ini biasanya disebut dengan administrasi keuangan negara.

Adminstrasi keuangan ini harus dikelola dengan baik karena dana yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Pengelolaan keuangan mi mencakup kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengawasan serta masalah-masalah keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku inilah yang dikatakan dengan kegiatan administrasi keuangan negara.

Dalam administrasi keuangan terdapat beberapa masalah penting yakni : Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, akuntansi, laporan dan pengawasan di satu pihak dan penggunaan dana di pihak lain.

Dalam sistem perencanaan, pelaksanaan akuntansi, laporan dan pengawasan memerlukan orgamsasi sebagai wadah. Organisasi disini dimaksudkan bukan hanya organisasi yang bersifat sosial atau yang mempunyai ruang lingkup kecil seperti yang ada di kelurahan, misalnya organisasi pemuda, organisasi ibu-ibu dan organisasi lainnya, tetapi juga meliputi organisasi yang mempunyai ruang lingkup yang besar seperti perusahaan dagang sampai kepada organisasi yang disebut dengan negara. Organisasi merupakan wadah atau tempat orang bekerjasama atau tempat melaksanakan administrasi.

Sekretariat Wilayah Dacrah Sumatera Utara adalah satu instansi pemerintah yang mempunyai peranan besar dalam pemerintahan di Propmsi Sumatera. Biro Keuangan adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di

bawahnya sedangkan Bendaharawan Biro Keuangan adalah salah satu Bidang dalam pelaksanaan tugas Biro tersebut..

Keberadaan bendaharawan ini memegang peranan yang sangat penting sebagai pemegang wewenang penyaluran keuangan daerah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 954/2572/1992 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Bendaharawan Daerah Serta Atasan Langsung bendaharawan/Pimpinan proyek Tata Usaha bendaharawan Daerah, Tata Cara Pengeluaran Behan Tetap dan Behan Sementara, Serta Tata Cara Pertanggung Jawaban dan Pengiriman Surat Pertanggung Jawaban bendaharawan Daerah.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Skripsi ini berjudul **“ ASPEK HUKUM PERANAN BENDAHARAWAN DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA “**.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

- Aspek hukum berarti sisi hukum, atau pandangan hukum
- Peranan artinya sesuatu yang menjadi bahagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa) ¹
- Bendaharawan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 954/2572/1992 adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Daerah. ²
- Dalam artinya tidak diluar.
- Pengelolaan berarti mengurus sebagaimana wewenang yang diberikan kepada suatu bagian kerja di dalam suatu organisasi.
- Administrasi keuangan adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu mulai dari proses penyusunan rencana anggaran, pengesahan anggaran. ³
- Di menerangkan kata tempat, atau berada pada suatu tempat.
- Biro Keuangan Setdapropsu adalah merupakan salah satu biro yang terdapat di Sekretariat Wilayah Daerah Sumatera Utara.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 755.

² *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tanggal 8 – 10 1992 No. 954/2572/1992*, hal. 2.

³ Soewarno Handuyangirat. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta. 1987, hal. 173.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah disekitar tentang fungsi yang diberikan oleh Bendaharawan sebagai salah satu tenaga yang terdapat di Biro Keuangan Setdapropsu di dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.

B. Alasan Pemilihan Judul

Biro Keuangan sebagaimana dikatakan pada bagian terdahulu adalah satu satu Biro yang terdapat di Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, dan dalam pelaksanaan tugas-tugas Biro Keuangan tersebut maka Biro Keuangan juga di bagi dalam beberapa bagian tugas, yang mana salah satu daripadanya adalah keberadaan bendaharawan.

Dalam pelaksanaan tatanan kerja dari bendaharawan maka bendaharawan juga dibagi atas beberapa bagian tugas yang mana bila tugas tersebut dilakukan secara baik sesuai dengan wewenang kerjanya akan dapat memberi dukungan terhadap pelaksanaan tugas di Biro Keuangan Setdapropsu.

Dana adalah sarana penunjang untuk lancarnya kegiatan kerja. Oleh sebab itu administrasi keuangan pada Biro Keuangan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan administrasi keuangan yang baik akan menyangkut beberapa aspek antara lain :

1. Dana yang tersedia mempunyai asal dan tujuan yang jelas.
2. Adanya tenaga ahli yang jujur dan berdedikasi.